

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menyatakan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) per bulan Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan menyumbang sebesar 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah dan menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perekonomian regional (djp.kemenkeu.go.id, 2024).

Perkembangan tersebut bukan hanya dirasakan di Indonesia, karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara, akan tetapi mereka masih menghadapi kesenjangan pembiayaan global yang diperkirakan mencapai sekitar US\$5,7 triliun sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang andal dan standar sehingga menimbulkan ketidaktransparan yang menghambat penilaian risiko dan akses ke kredit formal (smefinanceforum.org). Kondisi ini juga dialami di Indonesia, dimana dari riset *EY partheon* ada total kebutuhan pembiayaan UMKM pada tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 4.300 triliun dengan kemampuan suplai saat ini sebesar Rp 1.900 triliun yang artinya masih ada selisih sebesar Rp 2400 triliun total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM. Potensi pembiayaan UMKM masih sangat besar, akan tetapi masih menghadapi tantangan yang tidak sedikit, salah satunya banyak UMKM yang belum menyusun laporan keuangan secara konsisten karena minimnya literasi mengenai laporan keuangan sehingga mengurangi peluang pembiayaan dan

integrasi ke rantai nilai yang lebih luas (Kompas.com).

Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pelaku UMKM sebagai dasar pengambilan keputusan, meningkatkan kredibilitas usaha, serta akses ke layanan perbankan dan layanan pendanaan yang lebih luas (Surachman, dkk, 2023). Kualitas laporan yang baik menurut *International Accounting Standards Board* (IASB), adalah yang mencakup karakteristik utama seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman (IASB,2010). Berdasarkan data dan informasi Kabupaten Banyumas tahun 2024, jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sebanyak 89.553 unit usaha, dengan usaha mikro sebanyak 89.477 unit usaha, usaha kecil sebanyak 21 unit usaha, dan usaha menengah sebanyak 55 unit usaha. Kecamatan dengan UMKM terbanyak yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Cilongok dengan UMKM sebanyak 6.149 unit usaha.

Berdasarkan observasi awal peneliti yang dilakukan sebagai gambaran awal penelitian tentang kondisi nyata UMKM di Kecamatan Cilongok dengan menggunakan pedoman *preliminary study* (Sugiono. 2017), peneliti mengobservasi pada kurang lebih 20 UMKM yang sudah mencakup dari usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Cilongok, yang hasilnya masih ada pelaku usaha yang belum mencatat laporan keuangan dengan baik karena adanya kendala yang dihadapi para pelaku usaha antara lain kendala teknologi, kurangnya literasi tentang laporan keuangan, dan kurangnya sumber daya manusia dalam memahami ilmu dasar akuntansi sehingga banyak UMKM yang tidak melakukan pencatatan sesuai standar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di Kecamatan Cilongok masih cenderung rendah, sehingga perlu dilakukan kajian mendalam untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan

Digitalisasi pengelolaan keuangan, *financial teknologi* (fintech) dan kesiapan implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), menjadi fokus dalam penelitian ini dan melihat ketiga variabel saling berkaitan dengan kualitas laporan keuangan di

Kecamatan Cilongok. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Cilongok harus didukung dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor digital. Dukungan sektor digital dapat mempercepat pertumbuhan UMKM, terutama melalui digitalisasi laporan keuangan yang membantu UMKM mengelola keuangan secara lebih efektif, meningkatkan transparansi, serta akurasi dalam pencatatan dan pelaporan (Supriyadi, dkk, 2023). Melalui aplikasi dan platform akuntansi digital, pemilik UMKM dapat memperoleh data keuangan secara *real-time*, sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat (Fauzi, dkk, 2023). Transformasi digital ini juga membantu UMKM dalam memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, dan bisa meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas serta akses mereka ke layanan perbankan dan pendanaan yang lebih luas (Surachman, dkk, 2024). Di samping itu, kemajuan fintech turut memainkan peran penting dalam perkembangan UMKM.

Financial Technology juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan, dengan ide kreatif dan inovasi teknologi (Kusuma & Asmoro, 2020). Melalui *fintech*, UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman modal, dan manajemen arus kas secara online (Fajar & Larasati, 2021). *Fintech* memberikan fleksibilitas bagi UMKM dalam mengelola transaksi keuangan secara efisien dan aman. Integrasi *fintech* dan digitalisasi laporan keuangan memungkinkan UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran lebih teratur, mempercepat proses akuntansi, serta meningkatkan keandalan data keuangan. Hal ini tidak hanya mendukung UMKM dalam menjaga kesehatan finansial, tetapi juga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan atau investor (Surachman, dkk, 2024).

Kesiapan implementasi Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM. Menurut Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI) SAK EMKM sendiri disusun untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang dirancang dengan prinsip yang sederhana sehingga memudahkan UMKM untuk memahami dan menerapkan pada usahanya. Dalam implementasinya, masih banyak pelaku UMKM yang kurang sadar akan pentingnya menyusun laporan keuangan. Selain itu, pemerintah belum merata dalam memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM terkait SAK EMKM, sehingga pengetahuan pelaku UMKM tentang standar ini masih terbatas (Leilani & Andhaniwa, 2024). Dengan adanya SAK EMKM, UMKM memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diakui. Dasar pengukuran dalam standar ini adalah biaya historis, di mana entitas hanya mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya (Khotijah, 2019). Pedoman yang jelas ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai dengan standar.

Digitalisasi laporan keuangan yang didukung oleh teknologi *fintech* dapat mempermudah UMKM dalam menerapkan SAK EMKM, karena sistem akuntansi digital dapat otomatis mengolah dan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku (Darmawan, dkk, 2021). Namun, kesiapan UMKM dalam mengadopsi sistem digital ini berperan penting dalam memastikan proses implementasi SAK EMKM berjalan efektif. Dengan kesiapan yang memadai, proses implementasi SAK EMKM dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, membuka akses yang lebih luas ke fasilitas pendanaan, serta memperkuat daya saing dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan (Leilani & Andhaniwa, 2024).

Penelitian dari Khairina Nur Izzaty dan Grace Tianna Solovida (2023) menemukan bahwa Sosialisasi informasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan UMKM. Temuan dari Mitra Dewi Lestari, Yudi Prayoga, dan Mulkan Ritonga (2025) menemukan digitalisasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi laporan keuangan, sedangkan penelitian Martinus Budiantara (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi umkm dan inklusi keuangan tidak berpengaruh secara langsung

terhadap efikasi diri, serta tidak mampu meningkatkan *self efficacy* pada UMKM Sleman, hasil tersebut menunjukkan bahwa adopsi digital belum berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan dari Neri Asamira dan Sukiah (2025) juga menemukan bahwa digitalisasi akuntansi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini kemudian dikembangkan dengan mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, namun memiliki beberapa perbedaan dan pengembangan dalam variabel serta fokus kajiannya. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Izzaty dan Solovida (2023) Perbedaan tersebut terletak penambahan variabel *financial Technology (Fintech)* sebagai faktor yang turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Selain itu penelitian ini juga dibedakan dengan penentuan lokasi penelitian di Kecamatan Cilongok, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual UMKM di wilayah tersebut secara lebih kontekstual.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dan juga perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Pengelolaan Keuangan, *Fintech*, Dan Kesiapan Implementasi SAK EMKM Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang diajukan peneliti adalah:

1. Apakah digitalisasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok?
2. Apakah *fintech* berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok?
3. Apakah kesiapan implementasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok?
4. Apakah digitalisasi pengelolaan keuangan, *fintech*, dan kesiapan

implementasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pengelolaan keuangan sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok.
2. Untuk menganalisis pengaruh *fintech* sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesiapan implementasi SAK EMKM sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok.
4. Untuk menganalisis Pengaruh digitalisasi pengelolaan keuangan, pengaruh *fintech*, dan kesiapan implementasi SAK EMKM sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM di kecamatan Cilongok.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap Pengaruh digitalisasi pengelolaan keuangan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pengaruh UMKM di Kecamatan Cilongok
2. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap pengaruh *fintech* sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait UMKM di kecamatan Cilongok.
3. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap Pengaruh kesiapan implementasi SAK EMKM sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait UMKM di kecamatan Cilongok.
4. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi atau memberikan informasi atau referensi bagi mahasiswa atau yang akan melakukan penelitian berikutnya.